

STRATEGI PROMOSI KESEHATAN DALAM PROGRAM KOTA LAYAK ANAK BIDANG KESEHATAN DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU TIMUR

Miftahul Jannah^{1*}, Fitriani Abdal¹, Mulidia Puspitasari¹, Jumriana Ibriani¹

¹STIKES Datu Kamanre

*Alamat Korespondensi: aulhaddad113355@gmail.com

ABSTRAK

Latar belakang: Program Kota Layak Anak pada Kabupaten Luwu Timur belum sepenuhnya berjalan berjalan secara maksimal karena masih banyak kendala karena belum ada tanggung jawab penuh dari Dinas Kesehatan.

Tujuan: Untuk mendapatkan informasi secara mendalam, mengkaji dan menganalisis mengenai strategi promosi kesehatan dalam program Kota Layak Anak.

Metode: kualitatif dengan pendekatan *fenomenologi*.

Hasil: Penelitian ini menunjukkan 1) Advokasi, belum dilakukan secara maksimal mengenai KLA bidang kesehatan dari pihak Dinas Kesehatan 2) Dukungan Sosial pada program kota layak anak bidang kesehatan di Luwu Timur belum ada kegiatan terkait dukungan sosial yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, 3) Gerakan masyarakat, hanya berupa kegiatan-kegiatan lanjutan seperti pemenuhan hak gizi untuk anak-anak serta, pencegahan stunting. 4) Kemitraan, sudah ada bermitra dengan oraganisasi dan dunia usaha yang dilakukan oleh Dinas kesehatan, kecuali dengan lintas sektor seperti Puskesmas dan Satpol PP dalam kawasan tanpa rokok, sementara dari Dinas Sosial mengatakan bahwa telah bermitra denga semua OPD, PT vale dan *Asosiasi Perusahaan sahabat Anak*.

Kesimpulan: Strategi promosi kesehatan dalam Program Kota Layak Anak bidang kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten luwu timur belum berjalan secara optimal, karena yang dilakukan selama ini hanya merupakan program pokok dari dinas kesehatan yang dilakukan oleh semua Puskesmas, tidak mengkhusus bahwa itu kegiatan layak anak.

Kata Kunci: Kota Layak Anak, Advokasi, Dukungan masyarakat, Gerakan masyarkat, Kemitraan

PENDAHULUAN

Melalui Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2017 tentang Kota Layak Anak yang telah ditetapkan oleh Bupati Luwu Timur. Selain itu, keputusan bupati nomor 92/II/tahun 2017 tentang pembentukan gugus tugas kabupaten layak anak serta beberapa kebijakan lainnya diharapkan mampu menjadikan perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagai nilai budaya di Luwu Timur. (Peraturan Daerah Luwu Timur)

Salah satu cara yang dapat ditempuh dalam menangani permasalahan anak adalah dengan lebih mengoptimalkan fungsi kota dalam bentuk mengoptimalkan kebijakan Kota Layak Anak (KLA). Awal perjalanan konsep *child-friendly city* (CFC) atau Kota Layak Anak (KLA) sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari

proyek yang diinisiasi oleh UNESCO dengan program *Growing UpCity*. Kegiatan ini sendiri diujicobakan di empat negara terpilih, yaitu Argentina, Australia, Mexico dan Polandia. (Mahendra, 2017)

Berdasarkan data awal yang didapatkan di Dinas Kesehatan Luwu Timur bahwa dari 15 puskesmas hanya ada 4 yang memenuhi indikator pelaksanaan puskesmas ramah anak, penerapan kawasan tanpa rokok belum sepenuhnya di terapkan di gedung pemerintahan, fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar (pendidikan), tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang dikembangkan di wilayah yang terdapat anak, serta belum ada lembaga yang

memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental yang dapat diakses oleh anak.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan Fenomenologi untuk mengeksplorasi fenomena mengenai KLA pada Dinas Kesehatan di Kabupaten Luwu Timur dengan teknik observasi *in-depth interview* dan dokumentasi selama penelitian berlangsung.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini telah dilakukan di lingkup Di Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan September- Oktober 2019.

Informan Penelitian

Informan Kunci

Penanggung jawab KLA bidang kesehatan di Dinas Kesehatan Luwu Timur 1 Orang

Informan Biasa

Petugas promosi kesehatan di dinas kesehatan 2 orang, petugas kesehatan lingkungan di dinas kesehatan 2 orang, petugas gizi dan KIA di dinas kesehatan 1 orang

Informan Pendukung

Sekretaris Camat 1 orang, tokoh agama 1 orang, dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak 2 orang

Teknik Pengumpulan Data

Data primer: wawancara mendalam, observasi, dokumentasi

Data Sekunder: sumber data sekunder misalnya diperoleh dari Instansi terkait dalam hal ini Dinas kesehatan, buku-buku referensi, jurnal-jurnal penelitian, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bacaan lain dari berbagai disiplin ilmu yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

HASIL

Informasi Mengenai Advokasi KLA bidang kesehatan di Dinas Kesehatan.

Advokasi merupakan kegiatan yang memberikan bantuan kesehatan kepada

masyarakat melalui pihak pembuat keputusan dan penentu kebijakan didalam bidang kesehatan. Advokasi merupakan upaya atau sebuah proses yang strategis dan terencana dengan tujuan mendapatkan komitmen dan dukungan dari pihak-pihak yang terkait (*stakeholders*). Wawancara mendalam tentang Strategi advokasi KLA di Dinas kesehatan Informan dari petugas Promosi Kesehatan mengatakan bahwa yang melakukan kegiatan advokasi terkait KLA adalah dinas sosial, dinas kesehatan hanya mengutus beberapa petugas untuk mengikuti pertemuan terkait KLA yang dilaksanakan di Kota Palopo. Sementara untuk kegiatan advokasinya, dinas sosial hanya meminta data-data yang terkait. Seperti ungkapan informan berikut:

“Kalau kemarin itukan KLA di’ apa namanya di dinas sosial, terus terang kemarin itu cuma kan KESGA satu orang yang dari sini dia ikut sosialisasinya, kalau dari Promkes kita cuma dimintai data, karena kalau untuk advokasinya langsung dari bidangnya ini KLA di Dinas Sosial yang melakukan advokasi” (AN, 25 September 2019)

Informan juga menambahkan bahwa pernah melakukan advokasi terkait KTR larangan merokok yaitu mengundang SKPD, Camat, Kepala Desa dan Puskesmas membahas tentang larangan merokok. Informan juga mengatakan bahwa bagian dari kegiatan advokasi dan kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan tersebut merupakan bagian dari indikator yang ada di program Kota Layak Anak bidang kesehatan. Seperti ungkapan informan berikut:

“Tapi kalau untuk kegiatan lanjutan seperti KTR itukan masuk ji juga di KLA, nah kalau itu kami yang lakukan advokasi, KTR sendiri ada Advokasi yang di lakukan, kami undang SKPD, Camat, Desa sama Puskesmas, yang lakukan itu dari Dinas Kesehatan sendiri, kami sama-sama

bersosialisasi membahas tentang larangan merokok ini”. (AN, 25 September 2019)

Bentuk advokasi yang dilakukan adalah adanya pembentukan Peraturan Pemerintah daerah tentang kawasan tanpa rokok yang di buat untuk pengawasan KTR. Seperti ungkapan Informan berikut:

“Saat inikan sudah dibentuk PERDA nomor 9 tahun 2016 tentang KTR, ini nantinya untuk pengawasan dan pembinaan-pembinaan apakah di Desa juga sudah ada PERDES atau hanya berupa himbauan” (AN, 25 September 2019)

Hal inipun sama setelah dilakukan konfirmasi kepada informan terkait pertanyaan yang sama kepada Informan petugas KIA dan Gizi juga mengatakan bahwa advokasi yang dilakukan di Dinas kesehatan menyangkut program KLA itu sendiri belum ada. Tetapi, mereka mengatakan bahwa advokasi yang menyangkut tentang prevalensi Gizi, Faskes dengan pelayanan ramah anak, air minum dan sanitasi serta kawasan tanpa rokok yang merupakan bagian dari program KLA sudah dilakukan. Seperti ungkapan informan petugas KIA dan Gizi berikut:

“Tidak ada khusus advokasi tentang KLA kan banyak mi jalan program-programnya KIA yang berhubungan dengan itu toh, Kalau khusus advokasi tentang itu tidak ada ji kayanya, seperti inito Prevalensi Gizi kan sudah jalan, kalau PMBA belum ada pelatihannya yang dijalankan untuk di Luwu Timur, termasuk saya belum pernah di latih mengenai ini PMBA. Ini juga bagian dari program Kota Layak Anak FASKES dengan pelayanan ramah anak seperti Puskesmas percontohan Wawondula, air minum dan sanitasi juga sudah jalanmi memang, KTR juga ada keluar PERDA nya” (TR, 26 September 2019)

Terkait advokasi yang dilakukan dalam pemberian Air Susu ibu eksklusif yaitu telah dibuatkan Peraturan Daerah Nomor 14. Seperti ungkapan informan berikut:

“Kami kan sudah bikin PERDA tahun 2018 kemarin, PERDA No 14 Tahun 2018 kami yang buat di sini, sementara ini kami sementara buat peraturan bupatinya, berdasarkan ini ada beberapa pasal di dalam untuk dibuatkan menjadi peraturan Bupati. Kemarin inikan masih rancangan, kemarin waktu KLA belum ada memang ini, belum di sahkan Perda jadi baru rancangan kemarin yang saya masukan.” (TR, 27 September 2019)

Kebijakan terkait fasilitas untuk ibu menyusui juga ada dalam Peraturan Daerah yang telah dibuat. Seperti ungkapan informan berikut:

“Dalam PERDA juga ini ada aturannya soal fasilitas untuk ibu menyusui Kita usahakan mi juga ini karena ini PERDA baru” (TR, 27 September 2019)

Informasi Mengenai Dukungan Sosial KLA bidang kesehatan di Dinas Kesehatan.

Dukungan sosial adalah sebuah kegiatan dengan tujuan untuk mencari dukungan dari berbagai elemen (tokoh-tokoh masyarakat) untuk menjembatani antara pelaksana program kesehatan dengan masyarakat sebagai penerima program kesehatan tersebut. Dengan adanya kegiatan untuk mencari dukungan sosial melalui para tokoh masyarakat pada dasarnya adalah untuk mensosialisasikan program-program kesehatan, supaya masyarakat ingin menerima serta ikut berpartisipasi terhadap program kesehatan tersebut. Wawancara mendalam tentang Strategi dukungan sosial KLA di Dinas kesehatan. Informan mengatakan bahwa kegiatan dari Dinas kesehatan terkait dukungan Sosial belum pernah dilakukan tetapi pihak promosi kesehatan dari masing-masing Puskesmas yang merupakan perpanjangan

tangan dari Dinas Kesehatan turun langsung ke masyarakat mengenai kegiatan dukungan sosial. Seperti ungkapan informan berikut:

“Perpanjangan tangannya promkes yaitu ada di Puskesmas, kalau Dinkes langsung KLA belum, tapi kalau di Puskesmas itu sendiri kan ada ji promkesnya yang langsung turun ke masyarakat terkait dukungan sosial” (AN, 25 September 2019)

Petugas promkes mengatakan bahwa bentuk dukungan sosial dari Dinas Kesehatan lakukan adalah pembinaan-pembinaan kepada Puskesmas, lalu Puskesmas yang langsung ke tokoh masyarakat, tokoh agama dan kader-kader serta melihat penerapan KTR dan memastikan apakah di desa tersebut telah ada Perdes, SK atau hanya sekedar himbauan, serta pembuatan papan KTR dan pojok rokok dan khusus untuk KLA bidang kesehatan belum dilakukan. Informan juga mengatakan bahwa direncanakan akan dibuat penyuluhan dan pertemuan terkait KTR dan saat ini menunggu anggaran. Seperti ungkapan informan berikut:

“Pembinaan dari Puskesmas ke desa, kami undang TOMA, TOGA dan kader-kader jadi dia lihat penerapan KTRnya kan sudah ada Perda jadi dia lihat bagaimana di desa sudah adakah Perdesnya, SK atau hanya himbauan terus dilihat apakah sudah ada papan KTR atau pojok rokok, rencana tahun depan kalau mau penyuluhan dan pertemuan terkait KTR. Baru juga dikasih masuk anggarannya tapi tidak tau di acc atau ndak, karena itu mi masih banyak desa-desa yang belum terapkan, memang ada papan larangan merokonya, tapi tidak diterapkan dan juga sanksinya belum berjalan karena belum jadi juga PERBUT. Nanti mungkin kalau sudah jadi PERBUT baru turun Satpol untuk jalankan itu sanksi karena kalau KLA sendiri belum pernah” (AN, 25 September 2019)

Kegiatan yang dilakukan oleh petugas promkes selain KTR dari Dinkes ke puskesmas

merupakan intervensi dan penyuluhan terkait PHBS, Desa Siaga dan UKS. Seperti ungkapan informan berikut:

“Kegiatan yang lain juga seperti PHBS, Desa Siaga, UKS, persalinan di FASKES kan itu juga masuk di PHBS rumah tangga itu langsung di lakukan intervensi dan penyuluhan ke rumah tangga, tapi begitu mi banyak juga kendala-kendalanya karena mereka paham tapi untuk menerapkannya belum” (AN, 25 September 2019)

Dilakukan konfirmasi kepada informan petugas Promosi Kesehatan mengenai dukungan sosial, bahwa untuk kegiatan mendukung program Kota Layak Anak bidang kesehatan belum pernah dilakukan. Seperti ungkapan informan berikut:

“Belum ada memang media untuk mendukung ini anunya KLA, karena pelaporan itu baru kami buat tahun ini” (HA, 26 September 2019)

Namun untuk bentuk pendekatan sosial yang dilakukan adalah kegiatan sosialisasi dengan mengundang Tokoh masyarakat, dan bentuk kegiatannya hanya berupa sosialisasi yang selanjutnya di serahkan kepada masing-masing Puskesmas serta kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan yang sudah ada. Seperti ungkapan informan berikut:

“Kalau untuk kegiatan yang menyangkut program layak anak untuk kesehatan itu seperti Gizi anak, dan semua yang menyangkut kesehatan anak itu sendiri awalnya kita lakukan sosialisasi, sosialisasi yang dilakukan panggil tokoh masyarakat, tokoh agama serta kader, setelah sosialisasi itumi di follow up ke bawah sama pihak Puskesmas, kalau puskesmas kan dia rutin pertriwulan, seperti itu contohnya kan kampung KB, penanganan stunting, pembuatan pojok rokok biar anak terhindar dari asap rokok” (HA, 26 September 2019)

Sementara terkait pendekatan sosial dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mendorong ASI eksklusif serta penanganan Gizi buruk, informan mengatakan pihak Dinkes memberikan pelatihan motivator ASI ke tingkat Puskesmas dan melakukan penyuluhan ke tingkat desa, tetapi belum ada kegiatan khusus program Kota Layak Anak bidang kesehatan. Seperti yang diungkapkan informan berikut:

“Kami lakukan motivator ASI, penyuluhan dan kunjungan rumah, terus pemberian makanan tambahan, investigasi kasus Gizi buruk toh, jadi mereka pergi dengan lintas program seperti gizi, promkes toh, ini juga kalau ada yang tidak datang ke posyandu jadi di swiping ke rumahnya, dari Puskesmas dulu mereka buat laporan mereka kirim ke sini dan kami langsung investigasi turun langsung ke sana untuk memastikan apakah betul, kemudian di bawa ke RS begitu ji dek tapi kalau khusus KLA bidang kesehatan belum dilakuakn pi” (TR, 26 September 2019)

Pihak Dinas Kesehatan baru mulai mengusahakan melakukan pembinaan dan pengawasan ASI eksklusif, serta informan juga mengatakan seharusnya setiap instansi menerapkan ruang laktasi tetapi masih belum menyeluruh. Seperti ungkapan infoman berikut:

“Sebenarnya harus ada namanya pembinaan dan pengawasan karena ada di dalam PERDA, seharusnya itu seperti kantor, tempat-tempat umum itu sudah harus ada tempat ibu menyusui karena kami sudah banyak PERDA, susah sebenarnya karena itukan butuh ruangan, butuh anggaran jadi mungkin bertahap, kalau ruangnya sih ada mereka buat sekat-sekat terus ada sofa di dalam, ada sirkulasi udara, yang penting ada privasi untuk ibu menyusui, sudah ada beberapa ini yang sudah ada tapi belum menyeluruh” (TR, 26 September 2019)

Sementara ketika di konfirmasi lebih dalam terkait dukungan sosial yang dilakukan informan kunci mengungkapkan bahwa, untuk kegiatan seperti itu lebih banyak di Puskesmas karena Dinas Kesehatan hanya sebatas monitoring. Seperti ungkapan informan kunci berikut:

“Kalau untuk dukungan sosial toh Dinkes kan cuma monitoring, kalau kegiatan-kegiatan itu banyak di Puskesmas ji” (HJ, 27 September 2019)

Informan kunci juga menambahkan bahwa kegiatan yang dilakukan hanya berupa pertemuan berupa sosialisasi tentang program kesehatan yang akan dilakukan, tetapi kegiatan yang dilakukan itu merupakan kegiatan dari dinas kesehatan tetapi masuk dalam program kota layak anak. Seperti ungkapan informan berikut:

“Dukungan sosial memang lebih banyak bercerita sama puskesmas karena mereka sudah punya wilayah kerja masing-masing, paling juga bentuk kegiatan itu seperti pertemuan dan sosialisasi membahas kegiatan atau program yang akan dilakukan, seperti itu ji tapi kegiatannya memang puskesmas dan dinkes bukan khusus KLA tapi karena semua tentang anak misalnya itu sudah masuk mi juga dalam KLA” (HJ, 27 September 2019)

Dalam pengembangan fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak pihak Dinas kesehatan telah melakukan musyawarah perencanaan pembangunan mengenai fasilitas kesehatan dalam penyuaaraan hak anak. Seperti ungkapan informan kunci berikut:

“Kita juga pernah melakukan MUSREMBANG mengenai fasilitas kesehatan dalam itu mi penyuaaraan hak anak” (HJ, 27 September 2019)

Dinas Sosial mengungkapkan bahwa masalah pendekatan yang mereka lakukan adalah tanggung jawab masing-masing. Seperti ungkapan informan pendukung berikut:

“Bagaimana RKA nya bagaimana perbaikan gizi masyarakat, menurunkan stunting, bagaimana pelayanan di posyandu, itukan masuk semua di KLA dek, jadi adapun itu bagaimana pendekatannya, mereka mami itu masing-masing yang tentukan, Dinas Sosial sendiri hanya memberikan masukan, kami cuma undang, paparkan tetapi mereka juga kan sudah paham karena ada memang dari Bupati, masing-masing OPD bertanggung jawab tugas masing-masing” (JT, 04 Oktober 2019)

Ketika diwawancarai mengenai kegiatan kedepannya, informan mengungkapkan saat ini mulai merangkum semua kegiatan yang belum maksimal, dan mulai mengembangkan inovasi-inovasi yang nantinya bisa di tampilkan ketika penilaian KLA. Seperti ungkapan informan berikut:

“Inikan setiap tahun KLA jadi sekarang merangkum semua kegiatan-kegiatan yang masih ada kekurangannya, siapa tahu ada lagi inovasi-inovasi yang bisa kita kembangkan, nah bisa kita tampilkan nanti” (JT, 04 Oktober 2019)

Informasi Mengenai kemitraan terkait KLA bidang kesehatan di Dinas Kesehatan.

Kemitraan merupakan upaya melibatkan berbagai komponen baik kelompok, masyarakat, lembaga pemerintah atau non pemerintah untuk bekerja sama mencapai tujuan bersama berdasarkan atas kesepakatan, prinsip dan peran masing-masing. Di dalam kemitraan pada program KLA belum ada dinkes bermitra tetapi dalam program yang telah berjalan yang merupakan bagian dari KLA seperti dalam status gizi balita Dinas Kesehatan bermitra dengan lembaga masyarakat yaitu PKK mengadakan lomba

balita sehat dan memantau Posyandu, serta bermitra dengan PERSAGI (Persatuan Ahli Gizi Indonesia), seperti ungkapan informan berikut:

“Kalau sekarang tidak ada sih bermitra dengan siapa, tapi kalau program yang berjalan yang memang sudah ada, memang bermitra dengan PKK dalam memantau Posyandu dan mengadakan lomba balita sehat, juga ada itu PERSAGI membantu dalam penyebaran informasi” (TR, 25 September 2019)

Dalam persalinan di fasilitas pelayanan Kesehatan, informan mengataka bahwa Dinas Kesehatan telah bermitra dengan asuhan persalinan normal bentuk kegiatan berupa pelatihan dan juga bermitra dengan PT MARS dalam pelatihan asuhan persalinan normal, dan mengadakan peringatan hari gizi nasional bermitra dengan PERSAGI Luwu Timur dan PT Vale. Seperti ungkapan informan berikut:

“Kita bermitra dengan PT Mars untuk pelatihan asuhan persalinan normal bentuk kegiatannya dilaksanakan pelatihan dalam mencegah kematian ibu di fasilitas kesehatan dan juga kalau untuk media kita belum bermitra sama sekali sama media, tapi kalau PERSAGI Kabupaten Luwu Timur ada, dan PT Vale dalam melaksanakan Peringatan Hari Gizi Nasional pada tahun 2018 dan 2019 itu temanya selalu berbeda tiap tahunnya. (TR, 25 September 2019)

Sementara untuk kemitraan dalam Promosi kesehatan, informan mengatakan bahwa belum pernah bermitra dengan dunia usaha maupun organisasi-organisasi swasta dan saat ini hanya sekedar bermitra dengan lintas sektor seperti Puskesmas, Dinas Sosial dan Satpol PP. Seperti ungkapan informan berikut:

“Kalau organisasi-organisasi tidak pernah terlibat itu, karena ini juga baru tahun pertama

jadi belum pernah ki adakan evaluasi juga, kalau untuk swasta-swasta itu belum, cuma lintas sektor ji, sama media ndak ada pi, baru sebatas lintas sektor ji, dinsos, Puskesmas dan Satpol ji” (AN, 25 September 2019)

Ketika dikonfirmasi dengan informan lain terkait kemitraan antar organisasi perangkat daerah dalam pengelolaan kawasan tanpa rokok Informan mengatakan bahwa telah bermitra dengan Satpol PP. Seperti ungkapan informan berikut:

“Promosi kesehatan bermitra sama Satpol PP dalam KTR dan pelibatan nantinya dalam pemberian sanksi kalau sudah jalan ini perda, maksudnya ini sudah jalan tapi belum terlalu optimal” (HA, 26 September 2019)

Informan juga menambahkan bahwa untuk saat ini Dinas kesehatan belum bermitra dengan dunia usaha dan media dalam pengelolaan kawasan tanpa rokok. Seperti ungkapan informan berikut:

“Dunia usaha di’ dan media kayanya belum pi Dinas kesehatan sama itu dalam pengelolaan kawasan tanpa rokok” (HA, 26 September 2019)

PEMBAHASAN

Advokasi

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pemberian dukungan sosial terhadap program KLA bidang kesehatan belum mendapat dukungan sosial dari masyarakat, meskipun telah ada dibuat SK untuk mendukung program KLA itu sendiri tetapi dalam penerapan kegiatan yang dilakukan belum ada serta pengetahuan informasi secara mendalam tentang Program KLA belum diketahui oleh masyarakat. Salah satu untuk menilai keberhasilan pelaksanaan KLA adalah keterlibatan masyarakat dalam pemenuhan hak anak sehingga pembuatan SK itu hanya untuk pemenuhan penilaian KLA.

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa dukungan sosial di Luwu Timur masih sebatas kegiatan-kegiatan lanjutan yang dijalankan dan pendekatan sosial hanya berupa pendekatan untuk kegiatan yang sudah ada tetapi untuk mengkhusus terkait KLA bidang kesehatan belum secara maksimal dilakukan, dukungan sosial yang dilaksanakan baik untuk bina suasana individu ke tokoh-tokoh masyarakat, bina suasana kelompok seperti ke ketua RW,RT maupun karang taruna atau serikat pekerja lainnya, serta bina suasana publik melalui pemanfaatann media-media komunikasi yang ada belum dilaksanakan terkait program kota layak anak bidang kesehatan.

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa pemberdayaan masyarakat di Luwu Timur masih sebatas kegiatan-kegiatan lanjutan yang dijalankan, terkait pengadaan ruang laktasi yang diterapkan di instansi pemerintahan dan umum masih minim serta penerapan dari kawasan tanpa rokok yang telah di canangkan dan bentuk pengaplikasiannya seperti pembuatan pojok rokok dan larangan meorok masih minim. Kegiatan yang telah dilakukan merupakan kegiatan-kegiatan yang telah dijalaankan sebelum adanya program Kota layak anak, sehingga pihak dinas kesehatan mengatakan bahwa kegiatan yang terkait anak otomatis adalah kegiatan dari program kota layaka anak itu sendiri.

Kemitraan

Kemitraan merupakan upaya melibatkan berbagai komponen baik kelompok, masyarakat, lembaga pemerintah atau non pemerintah untuk bekerja sama mencapai tujuan bersama berdasarkan atas kesepakatan, prinsip dan peran masing-masing. Kemitraan pada esensinya adalah dikenal dengan istilah gotong royong atau kerjasama dari berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok. Menurut Notoatmodjo (2003), kemitraan adalah suatu kerja sama formal antara individu-individu, kelompok-

kelompok atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu.

Berdasarkan Analisa peneliti selama berada dilapangan didapatkan informasi bahwa kemitraan yang melibatkan komponen pemerintah dan non pemerintah sebagai mitra dalam bidang kesehatan, karena kemitraan terjadi telah ada sebelum ada program Kota Layak Anak bidang kesehatan.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil dan pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Advokasi yang dilakukan terkait Program Kota/kabupaten Layak Anak berupa pembuatan peraturan daerah seperti ASI eksklusif dan Higiene sanitasi depot air minum yang di lakukan pada tahun berjalannya program kota layak anak, tetapi untuk kegiatan belum sepenuhnya di lakukan, serta, keterbatasan anggaran dari Pemerintah Kabupaten menyebabkan dalam pelaksanaan program pemenuhan hak anak masih sebatas kegitan lanjutan.
2. Dukungan sosial yang dilakukan hanya berupa sosialisasi dan pembinaan yang telah dilakukan sebelum terbentuknya KLA bidang kesehatan sehingga kurangnya partisipasi masyarakat, akibat kurangnya informasi yang didapatkan secara maksimal tentang KLA terhadap pemenuhan hak anak.
3. Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas kesehatan sebagian sudah berjalan meskipun masih kurang maksimal dalam pemberdayaan yang mengkususkan untuk program KLA bidang kesehatan.
4. Kemitraan yang dilakukan Dinas Kesehatan dengan antar organisasi daerah, kemitraan dengan dunia usaha telah dilakukan, tetapi untuk kemitraan dengan media dalam kesehatan dasar dan kesejahteraan

SARAN

Adapun saran yang dapat peneliti berikan berdasarkan temuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur

Diharapkan untuk lebih paham terhadap gugus tugas dan tanggung jawab KLA bidang kesehatan adalah tanggung jawab Dinas Kesehatan, sehingga penerapan kegiatan terkait Program Kota/Kabupaten Layak Anak bisa sesuai dengan predikat yang didapatkan.

2. Untuk Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

Pemerintah Luwu Timur seharusnya lebih meningkatkan lagi strategi-strategi yang dilakukan dalam pengembangan Kota Layak Anak di Kabupaten Luwu Timur, baik berupa kebijakan dan program/kegiatan, hal ini bertujuan agar kedepannya pelaksanaan pengembangan KLA di Kabupaten Luwu Timur dapat berjalan secara maksimal serta predikat KLA yang diraih Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustriyono, Yanuar Adi Wibowo. 2018. Strategi Komunikasi Pembangunan Tim Promosi Kesehatan Puskesmas Polokarto Melalui Program Desa Siaga. *Jurnal Komunikasi Global*, Volume 7, nomor 1 2018.
- Hamudy, Iham A. 2015. Upaya Mewujudkan Kota Layak Anak an Effort to Build Child-friendly City. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*.Vol 14. No 4.
- Kemendes RI. 2014. Profil Kesehatan Indonesia tahun 2014.Jakarta
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2016. Petunjuk Teknis Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas.
- Mahendra, Gerry Katon 2017. Analisis Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Bidang Kesehatan Ramah Anak. *Jurnal Kesehatan Masyarakat* vol 1, no 2.
- Majid, Jahir. (2019, 23 juli) 14 Kota/Kabupaten di Sulsel Raih Predikat Kota Layak Anak. Diakses 09 agustus 2019 dari

- suselsatu.com:
<https://www.suselsatu.com/2019/07/23/makassar/14kotakabupaten-di-sulsel-raih-predikat-kota-layak-anak.html>
- Mubarak,Chayati. (2008), Buku Ajar Kebutuhan Dasar Manusia Teori dan Aplikasi dalam Praktik, Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Naralita, Widya. 2017, Peran Kemitraan dalam Sektor Kesehatan dan Nonkesehatan dalam Perluasan Kepesertaan JKN di Kabupaten Banyuasin. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*. Volume 8. Nomor 1 2017.
- Notoatmodjo, S. 2010. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Perda Luwu Timur. 2017. Kabupaten Luwu Timur. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Kota Layak Anak.
- Perda Luwu Timur. 2017. Kebijakan Luwu Timur. Peraturan Daerah No 57 Tahun 2017 tentang Kota Layak Anak
- Perda Luwu Timur. 2018. Kebijakan Luwu Timur. Peraturan Daerah No 14 Tahun 2018 tentang Kota ASI Eksklusif
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak,
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 tahun .2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kota.
- Putra, Firman Yulian. 2016. Strategi Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pemahaman Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Di Puskesmas Mangkurawan. *Jurnal Ilmu Komunikasi* Volume 4 nomor 1.
- Setiani, Raden Dewi. 2017. Implementasi kebijakan Pembentukan Kabupaten /Kota Layak Anak pada Bidang Pendidikan dan kesehatan di Kab. PandeGelang. *Jurnal ilmu sosial* Volume 4, nomer 3 tahun 2017
- Setyabudy, Ratih Gayatri 2017, Analisis Strategi Promosi Kesehatan dalam Rangka Meningkatkan Kesadaran Hidup Sehat oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah. Volume 4 nomor 1.
- Solang, Sescia Diana, Nansy Losu, dan Naomy Marie Tando. 2016. *Promosi Kesehatan Untuk Mahasiswa Kebidanan*. Bogor: In Media.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Wardani Ni, Muyyasaroh Y, Ani M. 2016. *Buku Ajar Promosi Kesehatan untuk Mahasiswa Kebidanan*. Trans Info Media.